

SAWALA

Jurnal Administrasi Negara
ISSN : 2598-4039 (Online)
ISSN : 2302-2231 (Print)

Volume 7 Nomor 2 2019, Halaman 108-121

Budi Hasanah
Prodi Administrasi Publik Fisipkum
Universitas Serang Raya

**TATA KELOLA DESA WISATA SUKARATU
BERBASIS KERAKYATAN**

Budi Hasanah

Program Studi Ilmu Administrasi Publik
Fisipkum Universitas Serang Raya

*Coessponding Author. Email : budihasanah@gmail.com

Abstract

Sustainable Development Goals (SDGs) is still being implemented until 2030. The commitment that is built must be in relevant with the objectives of the SDGs such as in the economic aspect to achieve the objectives carried out at the village level such as in Sukaratu Village. To achieve the goals, the government and local people should have great participation to develop village as a tourist village. Not only as a tourist village, need continuous development to form autonomous tourist village and directly be impacted for the better local economic activity. This study aimed to analyze the governance of tourist village based on populist in Sukaratu Village. The method was qualitative descriptive. The research results showed that the governance in Sukaratu Village based on populist was not going well. This was happened because the villager did not know the concept of a tourist village which impacted on difficult to implementing the sapta pesona as well as fulfilling the criteria of a good tourist village.

Keywords: *governance, Sukaratu village, tourist village, based on populist, SDGs.*

Abstrak

Konsep pembangunan berkelanjutan (SDGs) masih terus diimplementasikan sampai tahun 2030. Komitmen yang dibangun harus sesuai dengan tujuan SDGs seperti pada aspek perekonomian untuk mencapai tujuan yang dilakukan sampai pada tingkat desa seperti di Desa Sukaratu. Untuk mencapai tujuan tersebut, tidak hanya pemerintah yang berperan aktif namun partisipasi besar dari masyarakat lokal sangat dibutuhkan sehingga mudah bagi desa untuk dikembangkan contohnya telah terbentuk desa wisata di Desa Sukaratu. Namun tidak hanya sebatas terbentuk desa wisata, perlu adanya pengembangan berkelanjutan sehingga status desa wisata mandiri dapat dicapai dan secara langsung berdampak adanya pergerakan perekonomian masyarakat desa menjadi lebih baik. Peneliti ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana tata kelola desa wisata berbasis kerakyatan di Desa Sukaratu. Metode yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Hasil penelitian didapat bahwa tata kelola Desa Wisata Sukaratu berbasis kerakyatan masih belum berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan masih banyaknya warga desa yang tidak mengetahui konsep desa wisata yang berdampak pada sulitnya mengimplementasikan unsur-unsur sapta pesona serta pemenuhan kriteria desa wisata dengan baik.

Kata kunci : tata kelola, desa sukaratu, desa wisata, berbasis kerakyatan, SDGs

PENDAHULUAN

Pemerintah memiliki otoritas dalam mengelola negaranya. Pada perkembangan pengelolaan negara sampai tahun 2030, didasari oleh berbagai kebijakan yang dibuat dan diimplementasikan mengarah pada tujuan yang telah disepakati, berupa agenda pembangunan berkelanjutan yang bersifat universal termasuk Indonesia yang disebut dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs) dari hasil konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang diadakan di Rio de Janeiro Brasil Bulan Juni 2012. Pada konteks Negara Indonesia yang bersifat heterogen dalam segala aspek, melatarbelakangi dibuatnya regulasi desentralisasi mengenai pengelolaan negara sampai pada tingkat daerah (desa) maka diberlakukan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Tujuannya agar tidak ada proses pembangunan yang sentralistik sehingga masyarakat daerah khususnya perdesaan dapat merasakan segala upaya pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah melalui pemerintah daerah yang diberikan wewenang untuk mengelola daerah otonomnya. Secara spesifik, pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, 2014). Dengan demikian, sebagai daerah administrasi, desa harus mampu mengelola desentralisasi fiskal dengan cara mengembangkan potensi desa, meningkatkan kerjasama antardesa, meningkatkan kemitraan untuk

pengembangan potensi desa, dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan desa. Pemerintah desa harus mampu menggerakkan perekonomian desa dengan melakukan upaya-upaya efektif penggerakan aktivitas-aktivitas ekonomi masyarakat desa. Kesiapan pemerintah desa dalam otonomi desa tidak hanya menghasilkan penerimaan besar dalam keuangan desa, melainkan juga harus memberdayakan aktivitas ekonomi masyarakat (P.A, 2015). Artinya, segala upaya harus bertujuan untuk memenuhi kepentingan rakyat. Tidak hanya pangan, sandang, dan papan yang hanya merupakan kepentingan yang nampak sementara yang tidak nampak dan yang terpenting adalah bagaimana agar rakyat mempunyai kemampuan untuk dapat membangun dirinya sendiri sesuai dengan keinginannya (*empower*) yang dapat dipahami bahwa kebijakan pemberdayaan rakyat adalah kebijakan yang memiliki kualitas etis tertinggi (Nugroho, 2014). Melalui kewenangan otonomi itu, secara logis dapat diharapkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat akan lebih baik kualitasnya karena faktor jarak yang lebih dekat dan upaya pemberdayaan masyarakatpun bisa lebih efektif berdasar asumsi bahwa pemerintah daerah bisa pada tingkat pemerintahan desa lebih tau akan berbagai potensi yang dapat dikembangkan dari masyarakat (Pamaruan, 2002).

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang

diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI (Undang-undang Desa, pasal 1 ayat 1 tahun 2014). Berdasar peraturan ini sangat dibutuhkan partisipasi masyarakat dalam tata kelola pemerintahan desa yang baik (*good governance*) karena adanya pengelolaan tingkat desa ini mendorong masyarakat lokal sebagai subjek pembangunan (*model bottom-up*). *Governance* menekankan adanya kolaborasi dalam kesetaraan dan keseimbangan diantaranya pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat (*civil society*) sehingga dengan kondisi tersebut akan menjadikan pemerintah untuk memberikan pelayanan yang baik terhadap masyarakat. *Good governance* menekankan bagaimana pemerintah mau untuk berinteraksi secara kondusif dengan masyarakat dalam berbagai bidang mulai dari bidang sosial, ekonomi maupun politik (Laksana N Septiasa, 2013). Salah satunya, pemerintah desa dan masyarakat tersebut harus mampu mengidentifikasi daerah secara administratif sebagai lingkungan tempat tinggal mereka baik pada aspek sosial, alam, budaya, ekonomi, pendidikan, lingkungan dan lain-lain yang tujuannya dapat dimanfaatkan dan dikembangkan dengan baik khususnya bagi kesejahteraan mereka.

Setiap desa memiliki keunikan tersendiri termasuk Desa Sukaratu Kecamatan Cikeusal Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Desa ini sebelumnya masuk ke dalam Desa Cikeusal sebelum tahun 1981, tahun 1982 dilakukan pemekaran dan terbentuklah Desa Sukaratu dimana pada tahun 1983 pesta demokrasi pertama dilakukan dengan pemilihan kepala desa yang dipilih oleh rakyat Desa Sukaratu secara langsung. Setelah terbentuk dan terpilihnya kepala Desa Sukaratu memiliki dampak yang menghasilkan listrik dapat masuk Desa

Sukaratu pada tahun 1986 dan pembangunan Balai Desa Sukaratu pada tahun 1992 sebagai wadah untuk mempermudah proses pelayanan kepada masyarakat. Setelah kurang lebih 15 tahun kemudian, program PNPM yang termasuk model pengembangan ekonomi kerakyatan melalui pendekatan kultural untuk Desa Sukaratu pertama kali dilaksanakan. Melihat proses pembangunan Desa Sukaratu tidak berhenti sampai disitu. Secara geografis, desa yang berbatasan dengan Desa Sukamaju (sebelah utara), Desa Cirangkong Kecamatan Petir (sebelah selatan), Desa Cikeusal (sebelah timur), dan Desa Sukaraja (sebelah barat) telah melakukan pemetaan potensi desa yaitu Desa Wisata Sukaratu pada tahun 2018 bersama aparat desa dan Dinas Pariwisata baik tingkat Kabupaten Serang dan Provinsi Banten. Setelah kurang lebih setahun kemudian, telah dibuat destinasi baru yang dinamakan Taman Pesona. Hal ini, tidak terlepas dari adanya partisipasi masyarakat yang diberikan tetapi perlu adanya partisipasi masyarakat (berbasis kerakyatan) secara berkelanjutan sehingga desa wisata dapat berkembang baik.

Seperti pada Desa Pujonkidul Kecamatan Pujon Kabupaten Malang, telah adanya partisipasi masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Pujonkidul meliputi partisipasi tenaga fisik yang sudah dilakukan masyarakat Pujonkidul berupa pembangunan fasilitas dan infrastruktur wisata, partisipasi keterampilan dan kemahiran yang sudah melibatkan beberapa masyarakat berupa edukasi pertanian, peternakan, pembuatan makanan khas, pengelolaan *outbound*, pembuatan paket wisata, penyediaan *homestay*, dan penyediaan pemandu lokal, dan partisipasi harta benda dengan penerapan *sapta pesona* yang didukung

oleh komunikasi yang terjalin dengan baik antara pemerintah desa dengan masyarakat dan usia-usia produktif (Prabowo, Hamid, & Prasetya, 2016). Bentuk partisipasi ini belum dilakukan oleh sebagian besar desa sehingga masyarakat merasa terpinggirkan. Hal ini berdampak pada segala bentuk pembangunan yang dilakukan pada akhirnya tidak sampai pada tujuan kesejahteraan masyarakat tersebut. Seperti pada tata kelola Desa Wisata Linggarjati Kuningan Jawa barat, belum melibatkan partisipasi masyarakat. Tantangan dalam proses pengembangan desa wisata di Linggarjati adalah dominasi pemerintah dalam keseluruhan proses sehingga masyarakat tidak memiliki kesempatan dan kemauan untuk berpartisipasi penuh. Padahal bila mengacu pada pendekatan tata kelola pemerintah yang bersih dan berkelanjutan peran pemerintah diharapkan menjadi fasilitator dengan memberikan peran dan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat lokal. Masyarakat belum menjadi subjek utama pembangunan, namun masih menjadi objek pembangunan (*top-down*). Diperlukan kemauan politik pemerintah untuk mengurangi perannya dalam pengembangan desa wisata dengan membuka ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi (Sidiq & Resnawaty, 2014). Penyampaian atau pemberian pelayanan berupa barang atau jasa adalah penting, tetapi seperti dikatakan oleh Kirilin, “ini bukan peran penting dari pemerintah. Pemerintah adalah institusi masyarakat dengan satu kewajiban, yakni memfasilitasi pembuatan pilihan dan tindakan masyarakat (Parsons, 2011).

Hal serupa dialami oleh masyarakat lokal di Desa Wisata Jatiluwih Tabanan, Bali. Seharusnya masyarakat lokal khususnya masyarakat

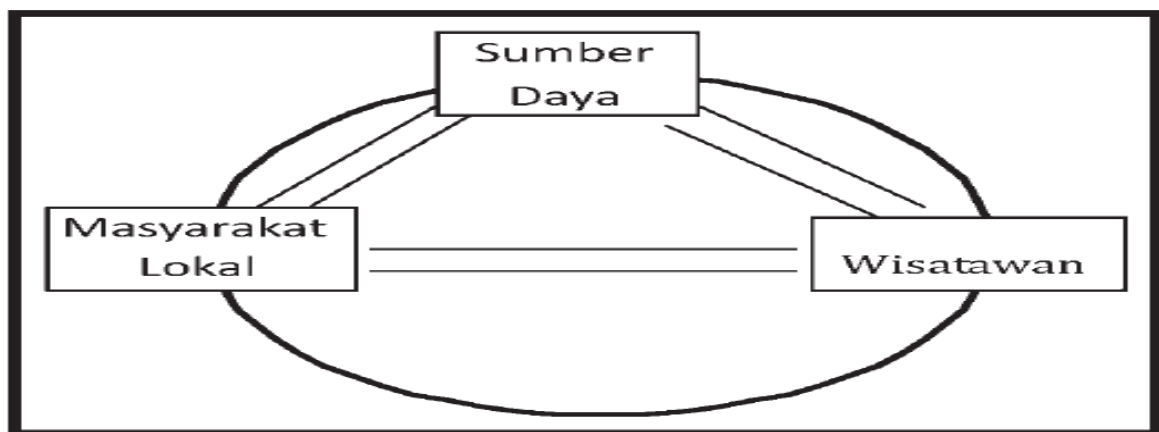
Desa Jatiluwih perlu diajak untuk mendesain sendiri model pariwisata yang akan dikembangkan. Selama ini pariwisata yang dikembangkan di desa wisata tersebut tidak pernah di desain oleh mereka. Pariwisata yang dikembangkan didesain oleh orang luar desa sehingga masyarakat lokal terpinggirkan. Pengembangan desa wisata berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, harus ada jaminan masyarakat untuk terlibat di dalamnya (Dewi, M.H Urmila, 2013). Hal ini dikarenakan, adanya tata kelola desa wisata berbasis kerakyatan yang mampu mendorong program percepatan desa wisata, dimana masyarakat berpartisipasi dengan aktif dalam mengembangkan desa wisata akan mampu menekan terjadinya urbanisasi orang desa ke kota dan memicu orang-orang desa untuk mengembangkan desanya dalam membuat produk wisata seperti menjadikan desanya sebagai desa wisata yang dapat memberikan peluang pekerjaan sehingga masyarakat tidak mencari pekerjaan ke kota (Pendampingan, 2019).

Sampai saat ini, desa yang sudah melaksanakan lima kali pesta demokrasi pemilihan kepala Desa Sukartu secara langsung ini terdapat permasalahan dalam proses tata kelola Desa Wisata Sukartu sehingga saat ini belum benar-benar dapat dirasakan manfaat keberadaan desa wisata oleh warga lokal. Pertama, tidak sedikit dari masyarakat Desa Sukartu yang keluar desa pada usia produktif untuk mencari pekerjaan. Hal ini dikarenakan sulitnya memperoleh penghasilan yang layak dari desa tersebut. Kedua, pelayanan yang diterima oleh wisatawan kurang baik karena minimnya fasilitas yang disediakan di Desa Wisata Sukartu. Ketiga, masih minimnya kemampuan masyarakat lokal

dalam mengidentifikasi dan memanfaatkan serta mengembangkan potensi yang ada di Desa tersebut. keempat, belum terjalinnya komunikasi yang baik serta berbedanya tujuan yang ingin dicapai antara kepala Desa Sukaratu dengan pengelola BUMDes. Kelima, tidak sedikit dari warga Desa Sukaratu yang paham mengenai konsep desa wisata. Keenam, masih ada potensi desa yang belum dieksplor dengan baik seperti sumber daya alam yang berasal dari hasil perkebunan (tanaman buah durian, rambutan, dan bambu)

Pada penelitian ini akan mengkaji bagaimana tata kelola Desa Wisata Sukaratu Kecamatan Cikeusal Kabupaten Serang berbasis kerakyatan pada bagian pengembangan pariwisata dengan menggunakan teori Natori yang menyatakan bahwa, tolok ukur pembangunan pariwisata berbasis kerakyatan adalah terciptanya hubungan yang harmonis antara masyarakat lokal, sumber daya alam/budaya, dan wisatawan yaitu, (1) Adanya peningkatan antusiasme pembangunan masyarakat

melalui pembentukan suatu wadah organisasi untuk menampung segala aspirasi masyarakat, melalui sistem kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat lokal; (2) Adanya keberlanjutan lingkungan fisik yang ada di masyarakat, caranya adalah melalui konservasi, promosi dan menciptakan tujuan hidup yang harmonis antara sumber daya alam, sumber daya budaya, dan sumber daya manusia. Penemuan kembali potensi sumber daya alam, dan sumber daya budaya; (3) Adanya keberlanjutan ekonomi melalui pemerataan dan keadilan dalam menikmati hasil-hasil pembangunan, (4) Membangun sistem yang menguntungkan masyarakat seperti sistem informasi yang dapat digunakan bersama-sama (5) Menjaga kepuasan wisatawan melalui pelayanan yang lebih baik, pengadaan informasi yang efektif, efisien, tepat guna serta mengutamakan kenyamanan bagi wisatawan. Hubungan antara komponen pembangunan pariwisata berbasis kerakyatan disajikan pada gambar berikut.



Gambar1. Pengembangan Pariwisata Berbasis Kerakyatan
Sumber: (Antara, Made, Satriawan I Ketut, 2016)

METODE PENELITIAN

Metode pada penelitian ini dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk mengetahui bagaimana tata kelola Desa Wisata Sukaratu berbasis kerakyatan dengan menggunakan Teori Natori. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder dengan menggunakan teknik *purposive sampling* dalam menentukan informan penelitian. Instrumen penelitian adalah peneliti sendiri dengan menggunakan *interview guide*. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi serta studi literatur dimana teknik pengujian validitas data dengan menggunakan triangulasi. Pada tahap analisis data berupa langkah-langkah yang dipakai walaupun dalam praktiknya pendekatan ini lebih interaktif dimana beragam tahap saling berhubungan dan tidak harus selalu sesuai dengan susunan yaitu, (1) mengelolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis; (2) membaca keseluruhan data; (3) meng-*coding* semua data; (4) menetapkan proses *coding* untuk mendeskripsikan yang akan dianalisis; (5) menunjukkan kembali deskripsi dan tema-tema yang akan disajikan kembali dalam narasi kualitatif; (6) membuat interpretasi atau memaknai data (Cresweel, 2016).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembangunan masyarakat adalah kegiatan yang terencana untuk menciptakan kondisi-kondisi bagi kemajuan sosial ekonomi masyarakat dengan meningkatkan partisipasi masyarakat (Andi Nu Graha, 2009:119). Artinya, terdapat berbagai aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat secara bersama-sama untuk memetakan apa saja masalah dan kebutuhan masyarakat Desa di Desa Sukaratu. Aktivitas ini

memperlihatkan adanya fungsi-fungsi manajemen tingkat lokal yang berjalan mulai dari perencanaan sampai pada evaluasi. Oleh karena itu butuh adanya wadah (lembaga atau organisasi) salah satunya untuk mempermudah menampung segala aspirasi masyarakat melalui sistem kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat desa. upaya pemantapan kelembagaan perdesaan diarahkan untuk meningkatkan peran lembaga kemasyarakatan desa sehingga masyarakat lebih berpartisipasi aktif dalam upaya pembangunan (Mahi, 2016). Terdapat struktur organisasi Desa Sukaratu dimana desa ini di pimpin oleh seorang kepala desa yang dibantu oleh Sekretaris Desa. Terdapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi sebagai penyelenggara pemerintahan desa yang dibentuk berdasar usulan masyarakat desa dimana BPD Sukaratu ini berfungsi juga untuk menetapkan peraturan desa bersama kepala desa serta menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Desa sukaratu terdiri dari lima Rukun Warga dan sebelas Rukun Tetangga serta memiliki lima kepala dusun atau kampung. Selain itu, Desa Sukaratu juga telah memiliki organisasi atau lembaga tingkat lokal yaitu BUMDes, Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN), Paguyuban Putra Kadupugur (PPK), Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS), dan K3 (Kelompok Kreatif Kadupugur).

Badan Usaha Milik Desa di Desa Sukaratu terbentuk tahun 2016 dimana sebelumnya masuk dalam Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN). Hal ini dikarenakan belum adanya unit usaha lain selain hasil pertanian. Setelah beberapa tahun kemudian muncul usaha lain dari hasil pakan ternak unggas sekitar seribu

ekor dan Desa Wisata Sukaratu sehingga dibentuklah BUMDes dimana GAPOKTAN sampai saat ini masih ada dan berjalan dengan baik. Hal ini dipengaruhi juga dengan pemanfaatan lahan produktif untuk pertanian yang luasnya mencapai 184 hektar dari total keseluruhan luas Desa Sukaratu 422 Hektar. Lahan pertanian merupakan lahan terluas yang ada di desa tersebut. Sama halnya dengan keberadaan GAPOKTAN, keberadaan organisasi lokal yang lain adalah Paguyuban Putra Kadupugur (PPK). Adanya antusiasme warga setempat untuk membentuk sebuah wadah yang memudahkan dalam membuat event baik event lokal dan nasional serta keagamaan Contoh misalnya acara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia, acara besar PHBI (Peringatan Hari Besar Islam), peringatan dalam mengikuti lomba kebersihan tingkat Kabupaten Serang yang sedang berlangsung selama tiga bulan kedepan, acara rutinitas mingguan pengajian dan kajian keagamaan dan lain sebagainya. Hal ini bertujuan untuk membangun masyarakat lokal melalui perkumpulan, berdiskusi, pengadaan kegiatan sampai pada evaluasi kegiatan sesuai dengan khas desanya.

Selain itu, ada juga Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) Desa Wisata Sukaratu yang mengemban amanah dalam usaha pengimplementasian sapta pesona. Desa Wisata Sukaratu sebisa mungkin harus memenuhi dan mewujudkan desa wisata yang terdiri dari tujuh unsur: aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah tamah dan kenangan agar dapat menarik minat wisatawan baik lokal maupun nasional atau bahkan internasional. Sampai saat ini, pengunjung yang datang kebanyakan dari wilayah Serang Timur seperti Cikande, Bandung, Pamarayan, Petir

hingga Tunjung Teja dimana waktu kunjungan yang ramai pada hari libur dan Hari Sabtu dan Minggu. Selain itu, terdapat kegiatan kemasyarakatan rutin setiap tahunnya dimana ada kerjasama antara POKDARWIS, Kepala Desa dan pihak lainnya sampai pada pihak pemerintah dan donatur hingga masyarakat yaitu Festival Mahkota Ratu yang bertempat di Desa Wisata Sukaratu. Tetapi, untuk tahun ini untuk sementara tidak diadakan terlebih dahulu karena ada berbagai kendala. Namun, jika melihat kegiatan tahun lalu memang sangat meriah. Kegiatan yang diadakan bertepatan dengan peringatan HUT RI yang ke-73 cukup menarik perhatian warga dan wisatawan. Festival yang berkonsep pengadaan berbagai perlombaan, seperti perlombaan tari tradisional, lomba permainan tradisional, menampilkan beberapa kesenian tradisional, parade karnaval sampai pada pertunjukan kembang api. Sampai saat ini, keberadaan POKDARWIS Sukaratu masih aktif berjalan walaupun harus terus dikembangkan secara kreatif dan inovatif dalam penerapan sapta pesona desa wisata agar desa wisata ini dapat berkembang menjadi desa wisata maju atau bahkan mandiri.

Berbeda dengan institusi atau lembaga lokal yang masih aktif berjalan, Kelompok Usaha Bersama (KUBE) sampai saat ini sudah tidak aktif lagi atau tidak berjalan. Sedangkan untuk Kelompok Kreatif Kadupugur (K3) baru terbentuk sekitar bulan Agustus 2019. Oleh karena itu, belum dapat dilihat efektif atau tidak dalam pemanfaatan dan pengoptimalan potensi Desa Sukaratu.

Berbagai organisasi lokal yang terbentuk di Desa Sukaratu bertujuan untuk dapat lebih mudah dalam membangun dan mengembangkan desanya yang didalamnya ada kolaborasi

berbagai pihak, baik pemerintah maupun masyarakat lokal. Bisa menjadi pilihan atau paket destinasi wisata jika berkunjung ke desa wisata tersebut. Pekerjaan Rumah bagi BUMDes berkoordinasi dengan aparat desa untuk dapat menciptakan unit-unit usaha baru untuk meningkatkan kualitas keberadaan Desa Wisata Sukaratu sehingga masyarakat lokal dapat merasakan pembangunannya. Selain itu, wisatawanpun tidak bosan untuk datang lagi ke lokasi mengingat sampai saat ini destinasi yang ada hanya Taman Mahkota Ratu dan Taman Pesona dimana tidak ada kriteria desa wisata lain seperti atraksi wisata unggulan, *something to buy* (apa yang di bawa) setelah wisatawan berkunjung serta yang tidak kalah penting adalah Desa Wisata Sukaratu memiliki diferensiasi dengan desa wisata lainnya.

Secara umum, keadaan Desa Sukaratu merupakan daerah dataran sedang dengan ketinggian 53 meter diatas permukaan laut. Desa Sukaratu mempunyai iklim tropis sehingga mempunyai pengaruh langsung terhadap aktivitas pertanian dan pola tanam di desa. Desa ini juga memiliki luas perkebunan yang cukup luas yaitu 147,5 Hektar yang merupakan lahan terluas setelah lahan pertanian. Namun, infrastruktur di desa ini sangat sempit dan gelap jika kita ingin menuju ke Desa Wisata Sukaratu. Jalan yang hanya dapat dilalui oleh satu arah ini digunakan untuk jalur dua arah sehingga penggunaan fasilitas jalan ini harus bergilir jika ada kendaraan dengan arah yang berlawanan. Hal ini sangat tidak memenuhi unsur-unsur yang terdapat pada Sapta Pesona yaitu rasa aman. Butuh adanya pembebasan tanah bekersamasama dengan Pemerintah Kabupaten Serang untuk memperluas jalan atau area kawasan Desa Wisata selanjutnya

dibuatkan pengaturan lalu lintas jalan keluar masuk area kawasan desa wisata. Terlepas dari permasalahan tersebut, pemerintah dan warga setempat serta lembaga lokal lainnya harus dapat menemukan keanekaragaman potensi yang ada sehingga dapat terlihat bentuk Desa Wisata Sukaratu dengan basis yang bervariasi khas lokal.

Destinasi pertama di Desa Wisata Sukaratu adalah taman Mahkota Ratu yang luasnya sekitar lima ribu meter dimana lahan ini dulunya berupa saung pertanian dan tidak lama kemudian menjadi taman baca dan juga taman bermain bagi anak-anak. karena jumlah kunjungan semakin hari semakin ramai maka dibuatlah tempat wisata. Misi besar Kepala Desa Sukaratu ingin memajukan dan mengembangkan desa dan disambut baik oleh ketua Rukun Tetangga dan Rukun Warga beserta masyarakat apa yang dicita-citakannya karena mereka mengetahui ini untuk masyarakat sendiri. Penambahan destinasi baru yaitu Taman Pesona berlokasi dekat dengan Kampung Kadupugur.

Oleh karena itu, kampung ini dijadikan kampung penyanggah objek wisata tersebut. Butuh adanya kesadaran dari semua lapisan masyarakat desa untuk memajukan desa wisata tetapi ini menjadi salah satu kendalanya. Bukan karena tidak antusias tetapi mereka belum ada ide dan tidak mengerti bagaimana caranya. Mereka antusias hanya pada sesuatu yang instan secara ekonomis. Mereka belum menemukan potensi desa yang menguntungkan bagi mereka. Hanya ada segelintir warga yang sadar tetapi ini tidak cukup. Oleh karena, butuh adanya intervensi dari berbagai pihak siapa saja untuk membantu agar masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam memajukan desa dimana hal ini bisa di awal dari Desa Wisata Sukaratu

tanpa menghilangkan identitas atau karakteristik daerah atau masyarakat itu sendiri. Bentuk kerjasama ini seiring dengan *goals*-nya program SDGs yaitu terciptanya iklim *partnerships for the goals* baik pihak pemerintah maupun swasta. Pentingnya *public privat partnership* ini dapat dilihat dalam tiga dimensi yaitu:

First is the political reason for creating a democratic government and encouraging the good governance and the good society. Second is the administrative reason due to the limitations of the government resources, both in terms of budget, human resources, assets, and management capabilities. Third is the economic reason, which is reducing the disparity or inequality, spurring the growth and productivity, improving the quality and continuity, and reducing the risk (Fafurida, 2017)

Pada tata kelola Desa Wisata Sukaratu, sudah ada pihak ketiga yang ingin berinvestasi dalam bentuk pembuatan kolam renang publik yang berlokasi di Taman Mahkota Ratu namun melihat anggaran BUMDes yang belum mencukupi sehingga belum terlaksana. Dalam waktu dekat ini, yang sedang proses penambahan destinasi berupa unsur atraksi adalah membuat *flying fox* dan lokasi untuk *outbond* serta tempat pemancingan ikan yang sebagian besar anggaran bersumber dari anggaran desa. Tetapi dalam manajemennya terpisah dengan Desa Wisata agar terlihat perhitungan pendapatannya secara proposional. Selain itu, terdapat unsur lain dalam waktu dekat ini akan dibuat fasilitas pertemuan dalam suatu acara dan tempat makan. Pihak pengelola BUMDes mengetahui informasi bahwa acara pemerintahan bertempat di hotel dikurangi. Hal ini merupakan peluang dibuatnya tempat pertemuan dimana

targetnya adalah pihak pemerintahan. Informasi ini didapat karena pengelola BUMDes cukup aktif mengikuti forum-forum yang diadakan oleh pihak Pemerintah Kabupaten Serang maupun Provinsi Banten seperti diskusi tentang penyertaan anggaran BUMDes. Tetapi, hal ini harus benar-benar dikonsepsi dengan baik agar bisa sesuai rencana. Terlepas dari itu, hal ini merupakan bagian dari strategi BUMDes agar ada pembaharuan “muka” Desa Wisata Sukaratu sehingga wisatawan tidak bosan datang kembali. Memang benar-benar dituntut bagaimana caranya meng-*creat* desa wisata yang kreatif dan inovatif agar tidak menjenuhkan.

Masyarakat setempat khususnya masyarakat kampung Kadupugur mengklaim adanya pemakaman ibu Khusen Mangkubumi yang masuk pada sejarah Banten pangeran Husen Mangkubumi. Tetapi, terdapat kendala pada proses pencarian pihak yang mewakafkan tanah tersebut. Masyarakat setempat diwakili oleh sesepuh Desa Sukaratu pernah mengajukan ke Dinas Sosial Kabupaten Serang. Hasilnya terdapat dua pihak yang mengklaim tanah wakaf tersebut. Setelah didiskusikan dengan tokoh masyarakat setempat tetapi belum ada penyelesaiannya.

Sebagian besar penduduk Desa Sukaratu bekerja di sektor perdagangan dan pertanian, Hal ini didukung oleh faktor jenis usaha warungan atau kelontongan mendominasi di tiap-tiap kampung, juga di bidang Pertanian dimana lahan garap pesawahan yang produktif yang tersedia luas serta adanya Gabungan Kelompok Tani yang kegiatannya berjalan dengan baik mewarnai kegiatan usaha di Desa Sukaratu. Dilegalkannya Desa Wisata Sukaratu diharapkan dapat menambah potensi yang dapat meningkatkan

perekonomian yang berkelanjutan melalui pemerataan dan keadilan dalam meningkatkan hasil-hasil pembangunan. Namun, pada perkembangannya, pendapatan yang dihasilkan dari adanya desa wisata hanya sebatas retribusi masuk sebesar Rp 3.000,- per orang. Artinya, tidak ada pemasukan lain selain dari retribusi. Padahal jika melihat unsur penting dalam desa wisata tidak hanya memenuhi unsur “*something to see*” (apa yang dilihat), tetapi ada unsur lain yaitu “*something to buy*” (apa yang dibawa) dan “*something to do*” (apa yang dilakukan). Oleh karena itu, harus dilakukan eksplorasi potensi yang kemudian dipromosikan kepada masyarakat dengan berbagai macam aktivitas keasliannya. Melihat perkembangan teknologi yang semakin canggih apalagi sudah adanya media internet, strategi pemasarannya dapat dilakukan melalui media sosial, *website*, youtube dan sejenisnya. Prinsip *equal* hasil dari desa wisata harus dirasakan oleh warga lokal sehingga mereka ada ketertarikan untuk membuka usaha baru dan pengembangan usaha yang sudah ada. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan minimnya kecemburuan sosial karena desa wisata kental dengan demokratis yang memiliki prinsip “dari, oleh, dan untuk rakyat.” Tetapi, sampai saat ini mayoritas masyarakat sebagai petani dimana usia di atas enam puluh tahun. Warga dengan usia produktif banyak yang keluar desa untuk mencari pekerjaan, mayoritas mereka bekerja di pabrik sekitar Tangerang dan Jakarta. Sedangkan, warga yang berada di rumah (di desa) statusnya pengangguran dan sekolah. Hal yang melatarbelakangi banyanya warga yang tergolong usia produktif melakukan urbanisasi karena mereka belum memiliki ide dan masih berfikir instan. Artinya,

jika ada kegiatan yang memiliki aspek ekonomis dan cepat, warga antusias.

Sebelumnya, pernah ada produk sabun piring yang diberi label 2RM (Raja Ratu Maju) yang bekerjasama dengan tiga desa yaitu Desa Sukaratu, Desa Sukaraja, dan Desa Sukamaju. Namun, beberapa tahun kebelakang sudah tidak berjalan dan sudah tidak ada lagi produk unggulan lokal serta hilangnya penghasilan dari produk tersebut. Karena ketidakjelasan hak penggunaan peralatan mesin tersebut serta belum adanya serahterima peralatan menjadi hak pakai pihak desa mana, menjadikan terbengkalai tidak terpakai mengingat harga mesin tersebut tidak murah maka perlu adanya pihak yang menyematani dalam menyelesaikan permasalahan ini. Masalah ini sudah dibawa pada tingkat kecamatan namun belum di respon. Kendala yang dihadapi dalam pemasaran produk sabun cuci piring 2RM cukup sulit karena harus bersaing dengan produk yang sudah menasional. Disamping belum diurusnya label halal dan sulitnya dalam memasarkan produk tersebut seharusnya ada strategi pemasaran lain sehingga produk tersebut dapat sampai ke tangan masyarakat lokal dan nasional sehingga produk ini dapat dijadikan sebagai salah satu produk unggulan yang dapat di bawa oleh wisatawan sebagai produk lokal unggulan dan bisa masuk kepada unit usaha berkelanjutan BUMDes.

Sampai saat ini, BUMDes belum mampu memberdayakan masyarakat banyak karena keterbatasan *cost*. Penyertaan anggaran awal dari terbentuknya BUMDes adalah sebesar dua puluh juta rupiah dalam satu tahun dapat mengumpulkan pendapatan kotor sebesar 128 juta rupiah. Badan Usaha Milik Desa memberikan cadangan APBDes dengan total sembilan juta

namun hal ini belum disanggupi oleh pengelola BUMDes yang kemudian dilakukan lagi negosiasi yang menghadirkan pengawas, BPD, dan kepala desa. Saat ini, rencana BUMDes ingin mengalokasikan lebih banyak untuk cikal bakal unit usaha BUMDes yang dijalankan oleh kelompok-kelompok warga Desa Sukaratu sehingga mereka dapat mandiri dan mengembangkan potensi diri dan alam serta potensi lainnya untuk dieksplor. Oleh karena itu, jika ada anggaran yang berasal dari kementerian, maka akan dialokasikan untuk modal warga membuat unit usaha baru dengan rata-rata perkelompok sebesar lima puluh juta.

Tata kelola Desa Sukaratu dalam hal mengenai anggaran yang didapat terdiri dari empat puluh persen untuk pengelola dan enam puluh persen untuk BUMDes. Pendapatan yang masuk pada BUMDes kemudian dibagi lagi sepuluh persen untuk cadangan APBDes, sebelas persen untuk cadangan kas, dua puluh tujuh persen untuk pengurus BUMDes yang terdiri dari komisar, pengawas (yang diberikan kepada auditor selama enam bulan sekali). Namun, saat ini unit usaha yang masuk kedalam BUMDes hanya unit usaha Desa Wisata taman Mahkota Ratu, Makanan ternak, dan pertanian. Adapun destinasi baru yang bernama Taman Pesona belum masuk ke dalam unit usaha BUMDes karena masih pada tahap pengembangan oleh Pemerintah Desa Sukaratu dengan anggaran sebesar dua ratus juta rupiah. Oleh karena itu, Pihak BUMDes belum memiliki ranah untuk mengelolanya. Tetapi, dalam perencanaannya akan diserahkan kepada BUMDes. Diharapkan, kedepan APBDes memiliki berbagai sumber pendapatan. Tidak hanya berasal dari alokasi dana desa dari Kabupaten Serang, alokasi dana desa dari

Kementerian keuangan dan pajak bumi. Saat ini sedang terus berproses adanya sumber anggaran yang masuk kedalam PADes yang berasal dari usaha desa yang dikelola oleh BUMdes. Berbagai unit usaha yang dikelola oleh BUMDes dapat menghasilkan produng unggulan desa itu sendiri sehingga unsur-unsur desa wisata (*something to see, something to do, dan something to buy*) serta pemenuhan kriteria desa wisata yaitu memiliki atraksi unggulan, terdapat fasilitas pendukung, memiliki sarana dan prasarana yang memadai, terdapat layanan tambahan termasuk kelembagaan, dan adanya keterlibatan masyarakat dapat terpenuhi tanpa mengesampingkan implementasi sapta pesona desa wisata itu sendiri.

Salah satu faktor penting dalam pengelolaan desa wisata harus mampu membangun sistem yang menguntungkan masyarakat agar dapat lebih mudah membangun dan mengembangkan desa wisata. Sistem informasi yang telah dibuat oleh Desa Sukaratu sampai saat ini adalah dibuatnya profil Desa Sukaratu. Melalui sistem tersebut diketahui secara administratif dan informatif didalamnya seperti sejarah desa, struktur organisasi desa, kondisi geografis dan demografi diantaranya batas wilayah, orbitasi (jarak dari pusat pemerintahan), luas wilayah, topografi desa. Selain itu terdapat juga informasi mengenai keadaan sosial diantaranya adalah jumlah penduduk, keadaan ekonomi desa. Tetapi profil desa ini belum cukup lengkap karena belum teridentifikasi secara rinci sampai pada potensi desa. selain itu, belum terpublikasikan dengan baik kepada warga masyarakat.

Berbagai usaha tata kelola desa wisata berbasis kerakyatan memicu pada tujuan untuk kepuasan wisatawan dengan pelayanan yang baik, pengadaan

informasi yang efektif dan efisien, tepat guna serta mengutamakan kenyamanan bagi wisatawan. Tidak hanya sebatas unsur “*something to see*” yang terpenuhi. Oleh karena itu, perlu adanya penguatan kriteria-kriteria desa wisata sehingga unsur-unsur lain seperti “*something to do* dan *something to buy*” dapat terpenuhi dengan baik. Namun, sepanjang perjalanan tata kelola desa wisata di Desa Sukaratu masih banyak pekerjaan rumah yang harus dikerjakan. Sangat sulit direalisasikan konsep desa wisata yang benar-benar masuk pada tahap desa wisata yang maju atau bahkan mandiri jika belum terpenuhinya kebutuhan pelayanan dasar bagi wisatawan salah satunya mengenai infrastruktur jalan. Selain itu, banyak bentuk pelayanan yang kurang memenuhi kriteria sebagai desa wisata. Seperti, (1) melestarikan dan memperkaya tradisi dan budaya setempat. Desa Sukaratu sudah memiliki kegiatan festival Mahkota Ratu yang dilaksanakan setiap tahunnya namun kegiatan ini tidak diselenggarakan secara konsisten setiap tahun. Padahal, jika melihat antusias baik masyarakat lokal maupun wisatawan yang datang cukup ramai dan menarik minat warga untuk datang ke Desa Wisata Sukaratu, (2) pelestarian Sumber Daya Alam. Masyarakat belum cukup mampu mengeksplor potensi dan meningkatkan kualitas sumber daya alam yang ada. Seperti dari hasil perkebunan yaitu tanaman bambu dan rambutan serta durian. Masyarakat menjualnya berbentuk buah durian dan rambutan yang bersifat musiman. Artinya, jika masyarakat dapat mengeksplornya dengan cukup baik seperti menjadi beberapa produk berbahan buah-buahan tersebut maka tidak hanya didapatkan pada saat waktu musim namun bisa dinikmati walaupun pada saat tidak musim. Selain itu, melimpahnya tanaman

bambu namun belum dioptimalkan dengan baik. Artinya, bambu ini jual hanya seribu rupiah perbambu. Padahal, jika dieksplor menjadi kerajinan dan kreativitas dari bambu menjadi produk unggulan lain yang ekonomis. Produk-produk ini dapat dijadikan sebagai unsur “*something to buy*” setelah wisatawan berkunjung ke wisata ini dengan melibatkan masyarakat (*community involvement*). (3) kualitas akomodasi yang terdiri dari kualitas layanan akomodasi dan pengelolaan akomodasi yang berkualitas. Desa yang disebut desa wisata adalah jika wisatawan bisa *stay* di desa tersebut. Karena ada waktu untuk interaksi pertukaran informasi budaya, adat dan lain-lain. Oleh karena itu, perlu adanya tempat tinggal yang difasilitasi untuk wisatawan, dinamakan *homestay* yang dapat berbaur dengan keluarga desa tersebut. sampai saat ini, fasilitas *homestay* belum ada dan untuk jangka pendek belum ada arah dibuatnya *homestay* karena masih banyak fasilitas dasar lain yang belum terpenuhi dengan baik dan masih kurangnya destinasi yang dapat dikunjungi oleh wisatawan yang dikemas menjadi paket wisata.

PENUTUP

Tata kelola Desa Wisata Sukaratu berbasis kerakyatan ini perlu dilakukan dan terus dikembangkan dimana proses pembangunan pada tingkat desa sangat dibutuhkan peran warga lokal. Bersama-sama mengeksplor potensi desa yang kemudian dapat dikembangkan berdasar sistem demokratis bertujuan untuk memajukan desa dan mensejahterakan warga masyarakat desa. Desa Sukaratu yang telah memiliki desa wisata namun tidak hanya sebatas menemukan potensi tersebut. Artinya, ada pembangunan berkelanjutan agar status desa wisata dapat meningkat menjadi maju atau

bahkan mandiri dari sebelumnya tanpa menghilangkan identitas Desa Sukaratu. Jika sudah terpenuhinya konsep desa wisata yang mengaplikasikan unsur-unsur sapta pesona dan berbagai kriteria desa wisata, jumlah wisatawan akan terus bertambah dan tidak hanya berasal dari wisatawan lokal. Hal ini akan berdampak positif jika desa tersebut produktif salah satunya dapat menghasilkan secara ekonomis.

REFERENSI

- Antara, Made, Satriawan I Ketut, A. I. N. S. (2016). *Panduan Tata Kelola Desa Wisata Kendran*. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Cresweel, J. W. (2016). *Research Design Pendekatan Metode kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dewi, M.H Urmila, F. C. M. (2013). Pengembangan Desa Wisata Berbasis Partisipasi Masyarakat Lokal Di Desa Wisata Jatiluwih Tabanan, Bali. *Jurnal Kawistara*, 3(2), 129–139. <https://doi.org/10.22146/kawistara.3976>
- Fafurida. (2017). Public-Private Partnership to Increase Economic Growth of Tourism Sector. *Ekonomi Pembangunan*, 18(1), 1–18.
- Laksana N Septiasa. (2013). Bentuk-Bentuk Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Program Desa Siaga di Desa Bandung Kecamatan Playen Kabupaten Gunung Kidul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 1(1), 56–67.
- Mahi, A. K. (2016). *Pengembangan Wilayah Teori dan Aplikasi*. (Kencana, Ed.). Jakarta.
- Nugroho, R. (2014). *Public Policy*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- P.A, A. H. (2015). Kesiapan Desa Menghadapi Implementasi Undang-Undang Desa (Tujuan Desentralisasi Fiskal dan Peningkatan Potensi Desa). *Civis*, 5(1/Januari), 737–751. Retrieved from <http://journal.upgris.ac.id/index.php/civis/article/view/634>

- Parsons, W. (2011). *Public policy, pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Pemaruhan, T. S. (2002). *Otonomi Daerah, Peluang dan Tantangan*. Jakarta: PT Percetakan Penebar Swadaya.
- Pendampingan, T. M. T. (2019). *Buku Panduan Pengembangan Desa Wisata Berbasis Pendampingan Melalui Perguruan Tinggi*.
- Prabowo, S. E., Hamid, D., & Prasetya, A. (2016). *Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata (Studi Pada Desa Pujonkidul Kecamatan Pujon Kabupaten Malang)*. *Jurnal Administrasi Bisnis S1 Universitas Brawijaya*, 33(2), 18–24.
- Sidiq, A. J., & Resnawaty, R. (2014). *Pengembangan Desa Wisata Berbasis Partisipasi Masyarakat Lokal Di Desa Wisata Linggarjati Kuningan, Jawa barat*. *Prosiding KS: Riset & PKM*, 4(1), 38–44.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (2014).
<https://doi.org/10.1145/2904081.2904088>